

# Upaya Indonesia Untuk Mengatasi Terorisme Dalam Kerangka Kerjasama

## *Asean Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) +3*

<sup>1</sup>Lanang Jagat Sejati, <sup>2</sup>Syaiful Anam, <sup>3</sup>Ahmad Mubarak Munir

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

E-mail : lanangj455@gmail.com

### **ABSTRACT**

*The ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) is a forum at ministerial level and below, which specifically discusses non-traditional issues regarding crime in the Southeast Asia region. This cooperation forum was created as a form of effort by countries in the Southeast Asia region who feel that the rise in crime of a transnational nature will pose a security threat in the Southeast Asia region. One of the transnational crimes in question is the crime of terrorism, which in recent years has had a negative impact on the security of the Southeast Asian region. With this assumption, the author will use the theory of International Cooperation assisted by the concept of Terrorism to be able to provide an analysis of what efforts can be produced from the AMMTC forum, especially the AMMTC Plus Three, which can be used as a reference by Indonesia to overcome the increasing number of acts of terrorism in the Southeast Asia region.*

**Keywords** : AMMTC Plus Three, Southeast Asia, Indonesia, Terrorism.

### **ABSTRAK**

*ASEAN Ministerial Meeting on Transnasional Crime (AMMTC) adalah sebuah forum setingkat menteri dan dibawahnya, yang khusus membahas tentang isu-isu non tradisional tentang aksi kejahatan di kawasan Asia Tenggara. Forum kerjasama ini dibuat sebagai bentuk upaya negara-negara yang berada dalam kawasan Asia Tenggara yang merasa bahwa dengan maraknya aksi kejahatan yang sudah bersifat transnasional akan dapat menjadi ancaman keamanan di kawasan Asia Tenggara. Salah satu kejahatan transnasional yang dimaksud adalah kejahatan terorisme yang beberapa tahun belakangan ini telah memberikan dampak negatif bagi keamanan kawasan Asia Tenggara. Dengan anggapan tersebut, penulis akan menggunakan teori Kerjasama Internasional dengan dibantu konsep Terorisme untuk dapat memberikan analisis mengenai upaya apa yang nanti dapat dihasilkan dari forum AMMTC khususnya AMMTC Plus Three yang dapat dijadikan rujukan oleh Indonesia untuk mengatasi peningkatan jumlah aksi terorisme di kawasan Asia Tenggara.*

**Kata kunci** : AMMTC +3, Asia Tenggara, Indonesia, Terorisme.

## Pendahuluan

Kejahatan transnasional bukanlah fenomena baru dalam hubungan internasional. Akan tetapi munculnya kejahatan transnasional tidak dapat dipisahkan dari era globalisasi saat ini. Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan transnasional antara lain adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat. Globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat menyebabkan hubungan antarbangsa, antarmasyarakat dan antarindividu semakin dekat, saling tergantung dan saling mempengaruhi sehingga tercipta suatu dunia tanpa batas (*borderless world*).<sup>1</sup>

Arus globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang pesat telah memberikan pengaruh yang besar terhadap dinamika kehidupan yang terjadi di dunia termasuk di kawasan Asia tenggara. Isu-isu yang dulunya dianggap sebagai persoalan domestik dapat dengan cepat berubah menjadi persoalan yang bersifat transnasional. Begitu juga persoalan keamanan yang semula dianggap kecil dapat bertransformasi dengan masif menjadi isu yang menarik perhatian dunia. Globalisasi telah menyebabkan dunia seolah-olah lupa akan batas dan cenderung mengikis kedaulatan negara sehingga akan sulit tanpa adanya kerja sama kolektif dalam mengatasi isu-isu transnasionalisme.<sup>2</sup>

Di kawasan Asia Tenggara, kerja sama sebagai wujud persamaan nasib untuk mencari solusi bersama telah dimulai sejak berdirinya organisasi regional *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok.<sup>3</sup> Peristiwa

---

<sup>1</sup> Kementerian Luar Negeri Indonesia, *Kejahatan Transnasional*, 2019, p.2

<sup>2</sup> Globalisasi Payung Baru Bagi Terorisme,' *Geotimes*, 2017, <<https://geotimes.id/opini/globalisasi-payung-baru-bagi-terorisme/>>, diakses pada 15 Februari 2023

<sup>3</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Pembentukan Kerjasama ASEAN*, Jakarta, 2009, p.1.

itu merupakan puncak kesepakatan pimpinan lima negara yang terdiri atas Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand untuk mendirikan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Dalam perkembangannya, anggota ASEAN bertambah menjadi sepuluh negara dengan masuknya Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos (1995), Myanmar (1995), dan Kamboja (1998).<sup>4</sup>

Dengan adanya uraian di atas memberikan penjelasan bahwa dengan adanya kerjasama diantara negara-negara yang berpegang teguh pada ASEAN memberikan dampak yang berarti bagi kelangsungan hubungan baik antar-negara anggota di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama yang selama ini berlangsung dalam bidang ekonomi, maupun keamanan sudah terjalin cukup baik mengingat beberapa kerjasama diantaranya sudah cukup lama terjalin yaitu persoalan keamanan kawasan yang beberapa kali menjumpai jalan buntu dalam penerapannya.

Meskipun begitu keadaannya pihak-pihak yang menjadi anggota ASEAN memiliki solusi untuk selalu memberikan jalan tengah guna menjadikan kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang damai, aman dan jauh dari persoalan-persoalan yang dapat memecah-belah persatuannya. Adapun isu-isu kejahatan transnasional yang beberapa tahun belakangan ini menjadi isu yang kerap menjadi masalah bagi keamanan kawasan Asia Tenggara. Isu kejahatan transnasional seperti, perdagangan manusia, peredaran narkoba dan aksi kejahatan terorisme.

Kejahatan terorisme menjadi sebuah pokok pembahasan dalam penelitian ini. Berkembangnya aksi kejahatan terorisme dalam beberapa tahun terakhir itu memberikan pelajaran bagi negara-negara anggota ASEAN dan juga masyarakat didalamnya yang terbelenggu dalam kekhawatiran. Segala bentuk kekhawatiran yang lahir dari kejahannya

---

<sup>4</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Tambahan Negara Anggota ASEAN, Jakarta, 2009, p.1.

aksi teror tentu saja harus segera ditemukan cara penanganannya, mulai dari membahasnya dalam skala nasional hingga memanfaatkan kerjasama kawasan sebagai langkah yang nantinya diharapkan lebih mampu memberikan hasil yang baik guna memberikan jaminan stabilitas keamanan kawasan.

Oleh karena adanya beberapa dasar ataupun gambaran umum di atas, dapat ditarik sebuah anggapan bahwa kerjasama yang akan dibahas oleh peneliti adalah Kerjasama AMMTC +3 yang nanti dapat melahirkan beberapa upaya-upaya yang bisa dijadikan cerminan oleh Indonesia untuk menentukan langkahnya dalam mengatasi terorisme. Kerjasama ASEAN dalam rangka menangani masalah kejahatan transnasional pertama kali diangkat pada pertemuan Menteri Dalam Negeri ASEAN di Manila pada tahun 1997 dengan dikeluarkannya *ASEAN Declaration on Transnational Crime*.

Pada pertemuan awal tersebut yang dilakukan dengan koordinasi dan kerjasama secara regional yang kemudian dinamakan forum AMMTC. AMMTC lalu menjadi sebuah wadah yang memfasilitasi pertemuan para Menteri di ASEAN yang menangani kejahatan lintas negara. Pada pembahasan berikutnya, Indonesia mengusulkan untuk melakukan peningkatan kerjasama melalui AMMTC +3 bersama Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan untuk mengatas ancaman kejahatan transnasional yang khususnya kejahatan aksi terorisme.

Kerjasama dalam lingkup AMMTC ini kemudian menjadi penting untuk ditindaklanjuti karena selain dampak negative yang ditimbulkan terhadap pertahanan dan keamanan negara, penanganan isu terorisme juga menjadi signifikan untuk dilakukan bersama-sama di lingkup ASEAN melalui forum AMMTC karena seluruh negara anggota ASEAN sudah meratifikasi ACCT pada tahun 2011 lalu. Oleh karena itu,

peneliti menggunakan teori kerjasama internasional yang diyakini sebagai dasar yang jelas mengapa penelitian ini membutuhkan pondasi yang bagus untuk menemukan solusi dari permasalahan yang diangkat. Bersamaan dengan hal itu, peneliti menggunakan konsep terorisme sebagai dasar juga untuk melihat bagaimana aksi terorisme dapat kemudian lahir menjadi persoalan keamanan kawasan.

## **Kerangka Teori**

Dalam usaha untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penelitian membutuhkan alat analisis untuk dapat membantu peneliti dalam melihat, memahami, menjelaskan, serta menganalisis permasalahan dalam sebuah penelitian. Peneliti menggunakan kerangka teori untuk membentuk pola pikir dan sudut pandang terkait penelitian yang dikaji. Penelitian ini menggunakan Teori Kerjasama Internasional dan Konsep Terorisme dalam menjawab masalah yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya.

### **1. Teori Kerjasama Internasional**

Penelitian ini menggunakan teori kerjasama internasional dalam mengkaji dan menganalisis penelitian tentang Upaya Indonesia Untuk Mengatasi Terorisme Dalam Kerangka Kerjasama AMMTC +3. Sejak semula, fokus dari teori-teori hubungan internasional adalah untuk mempelajari tentang penyebab-penyebab dan kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama. Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak/Negara saling memiliki kepentingan satu sama lain untuk segera dilaksanakan.

Kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum. Aktor-aktor Negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasional (yaitu dalam tulisan ini menyangkut tentang ASEAN) dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui regulasi-regulasi, norma-norma, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan-harapan para aktor/Negara dan kepentingan-kepentingan yang hendak dibangun bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional.

Kerjasama dapat tumbuh dari suatu komitmen individu atau kelompok terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan pribadi/kelompok/nasional. Kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap Negara percaya bahwa yang lainnya akan bekerja sama. Sehingga isu utama dari teori kerjasama adalah didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi/kelompok/nasional, dimana hasil yang menguntungkan masing-masing pihak dengan bekerja sama dari pada dengan usaha sendiri atau dengan persaingan. Begitulah penjelasan dari penulis berkaitan dengan dasar-dasar yang perlu dibahas mengenai Teori Kerjasama Internasional yang menjadi pilar kedamaian.

Ada beberapa alasan mengapa Negara melakukan kerjasama dengan Negara lainnya :

1. Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
3. Adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.

4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual Negara yang member dampak terhadap Negara lain.

Kerjasama internasional pada umumnya berlangsung pada situasi-situasi yang bersifat desentralisasi yang kekurangan institusi-institusi dan norma-norma yang efektif bagi unit-unit yang berbeda secara kultur dan terpisah secara geografis, sehingga kebutuhan untuk mengatasi masalah yang menyangkut kurang memadainya informasi tentang motivasi-motivasi dan tujuan-tujuan dari berbagai pihak sangatlah penting.

Terorisme telah menyebar ke seluruh dunia, aktor serta aksi yang mereka lakukan telah menembus batas-batas antarnegara, oleh karena itu terorisme dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional. Untuk itu penanganannya juga harus lintas batas Negara. Terorisme juga telah dinyatakan sebagai ancaman yang serius serta membahayakan ketertiban dan keamanan dunia, hal ini dapat kita lihat dari sikap Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang pada tahun 1995 yang mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasiona yang satu didalamnya adalah terorisme. Oleh karenanya kemudian masalah terorisme dijadikan agenda tetap dalam hubungan internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Penulis juga menekankan bahwa pemberantasan terorisme mutlak memerlukan adanya kerjasama internasional dan tidak satupun Negara di dunia yang dapat terlepas dari jeratan ancaman terorisme.

## **2. Konsep Terorisme**

Dalam literatur politik dunia, Konsep Terorisme dapat diartikan secara berbeda-beda, namun tergantung pada seseorang yang mendefinisikannya. Tidak hanya dari aspek politik dan keamanan tetapi juga ideologi dan keyakinan keagamaan yang mengakibatkan timbulnya banyak aksi terorisme yang mengatasnamakan agama. Di sisi lain, kehidupan

sosial politik yang timpang tentunya dapat menimbulkan frustrasi dan keputusasaan yang mendorong sikap orang menjadi cenderung agresif hingga melakukan aksi teror. Sementara itu, tidak sedikit yang menggunakan teror sebagai perjuangan untuk mengejar tujuan politik. Dikarenakan hal tersebut, tidak jarang aksi terorisme juga dilakukan oleh seseorang yang fanatik atau militan yang bersifat religius. Sikap militansi yang dibahas diatas tersebut bias timbul dalam setiap agama, tanpa terkecuali. <sup>5</sup>

Motivasi pelaku *terorisme* dapat bersumber pada alasan-alasan *idiosinkratik*, kriminal, maupun politik. Dalam Konsep Terorisme, sasaran atau korban bukan merupakan sasaran sesungguhnya, namun tidak lain sebagai bagian dari taktik intimidasi, koersi, ataupun propaganda untuk mencapai tujuan-tujuan lain yang lebih bernilai bagi mereka (pelaku teror). Akar dan motif *terorisme* erat kaitannya dengan dimensi moral yang luas. Misalnya, nilai, ideologi, agama, tatanan Negara yang terbilang tidak adil, dan struktur sosial maupun konstelasi dunia yang mereka anggap kurang memihak kepentingan yang mereka inginkan. Beragamnya karakteristik dari pelaku beserta dengan tujuan dari aksi terorisme yang dijalankan tentu dapat menimbulkan berbagai motif-motif dilancarkannya *terorisme*. Motif-motif yang tertulis diatas akan saya jelaskan sebagai berikut :

#### 1. Motif Politik

Secara umum semua bentuk *terorisme* mengandung motif politik, pandangan klasik mengenai terorisme menyebutkan bahwa : *Terrorism has been defined as the substate application of violence or threatened violence intended to show panic in society, to weaken or even overthrow the incumbents, and to bring about political change. It*

---

<sup>5</sup> Asep Adisaputra, Konsep Terorisme, 2008, Vol. 2. No. 3, p. 7-9, <<https://jurnal.ugm.ac.id>> diakses pada 27 Februari 2023



*shades on occasion into guerrilla warfare (although unlike guerrillas, terrorists are unable or unwilling to take or hold territory) and even a substitute for war between states.* (Terorisme dirumuskan sebagai penerapan kekerasan atau ancaman kekerasan sub-negara yang ditujukan supaya muncul kepanikan di masyarakat, untuk melemahkan atau bahkan menggulingkan kekuasaan yang sedang memerintah, serta menimbulkan perubahan politik. Sesekali *terorisme* tampak seperti perang gerilya (meskipun tidak sama dengan gerilyawan, teroris tidak mampu atau tidak ingin mengambil alih atau menguasai suatu wilayah) dan bahkan seolah-olah merupakan pengganti perang antar Negara).<sup>6</sup>

## 2. Motif Ekonomi

*Terorisme* yang bermotifkan ekonomi, yakni mencari keuntungan secara materiil sebanyak-banyaknya, biasanya dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan (*crime organizations*) seperti Mafia, Yakuza, dan Kartel-kartel perdagangan obat terlarang dan sejenisnya.

## 3. Motif Penyelamatan (*Salvation*)

Motif ini berkaitan erat dengan ajaran sekte-sekte aliran kepercayaan. Salah satu contoh aksi terorisme yang paling berkesan adalah yang dilakukan oleh sekte Aum Shinrikyo di Jepang oleh pimpinan Shoko Asahara. Kelompok sekte ini pada bulan Maret 1995 melakukan teror dengan gas sarin di stasiun bawah tanah Tokyo yang menewaskan 10 orang dan melukai 5.000 orang. Disamping itu, Pelaku *terorisme* sama sekali tidak menganggap tindakannya sebagai aksi teror. Mereka berkeyakinan bahwa manusia hidup senantiasa dalam keadaan terpenjara dan sengsara, dengan anggapan tersebut yaitu

---

<sup>6</sup> Asep Adisaputra, Motif-motif Aksi Terorisme, 2008, <<https://jurnal.uns.ac.id>> diakses pada 28 Februari 2023

dengan cara suatu kematian yang cepat tersebut mereka justru menyebutnya sebagai bentuk penyelamatan.

#### 4. Motif Balas Dendam

*Terorisme* dalam motif ini biasanya dilakukan pelaku individual, atau kelompok-kelompok kecil yang terorganisir dengan dibantu oleh organisasi-organisasi kejahatan. Pelaku bersifat individual dengan motif balas dendam, meskipun turut melibatkan organisasi atau sasaran individual (pejabat) pemerintahan. Kasus-kasus seperti ini ditemukan dalam berbagai aksi terorisme Baader Meinhoff dan Brigade Merah di Eropa Barat pada dekade 1970an.

#### 5. Kegilaan (*Madness*)

Pelaku dengan motif ini biasanya melakukan aksi terorisme dari adanya penyimpangan psikologis yang disebabkan oleh pihak-pihak yang dinilai tidak sejalan dengan apa yang mereka harapkan.

Mengenai penjelasan dari beberapa ahli mengenai definisi tentang kerjasama internasional itu seperti apa, serta hal-hal yang mendasari lahirnya sebuah kerjasama itu atas dasar apa, entah itu tujuan meningkatkan kemajuan ekonomi maupun meningkatkan stabilitas kawasan. Oleh karena itu pada penelitian ini, penulis memaparkan bahwa dengan beberapa kejahatan terorisme di masa lalu yang memberikan luka yang cukup mendalam, bukan hanya di Indonesia namun di beberapa negara Asia Tenggara lainnya yang memberikan belenggu kekhawatiran yang lama. Dengan alasan tersebut menjadi isyarat bahwa petinggi negara atau pihak-pihak institusi negara dengan tokoh-tokoh penting dibawah panggung kerjasama *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational*

*Crime Plus Three* (AMMTC +3) forum ini lahir yang didasarkan karena tidak mampunya penanganan aksi kejahatan terorisme pada forum sebelumnya.

Dengan adanya konsep diatas yaitu konsep terorisme, penulis meyakini bahwa konsep ini dapat membantu penulis untuk memberikan arahan secara sistematis guna membantu menyelesaikan pembahasan mengenai upaya-upaya seperti apa yang perlu dilaksanakan oleh pihak Indonesia untuk mengurangi angka terorisme dengan berkaca pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya membahas terkait penanggulangan terorisme di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang yang belakangan ini kerap digunakan sebagai penelitian sosial, komunikasi dan lain sebagainya. Metodologi penelitian kualitatif ini nantinya akan menghasilkan sebuah data deskriptif dimana data ini berupa deskripsi yang terbentuk dari rangkaian kata dan bahasa yang nantinya dapat menjawab sebuah persoalan yang ada tanpa memerlukan proses hitungan atau data statistik dari sebuah penelitian. Pada penelitian menggunakan metode ini, penulis mencoba mendeskripsikan atau menggambarkan isu yang ingin penulis teliti namun tanpa mengubah hal tersebut menjadi sebuah angka ataupun simbol. Menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini lebih memfokuskan menggunakan jenis data sekunder daripada primer, dikarenakan penggunaan data sekunder lebih efektif dibandingkan penggunaan data primer dalam kondisi penulis ketika membuat penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dalam mencari data merupakan teknik studi pustaka yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara sebuah teknik pengumpulan data yang bersumber dari refrensi literatur baik berupa jurnal, buku, artikel, ataupun pendapat peneliti sebelumnya mengenai tema

yang diusung. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis yang berasal dari Milles dan Huberman, yang mana teknik analisis data ini memiliki 4 tahapan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Keempat tahapan tersebut saling terhubung satu sama lain.

## **Hasil Dan Pembahasan**

Kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu fokus perhatian dunia terkait dengan meningkatnya perkembangan pada aksi kejahatan terorisme. Kawasan ini dianggap sebagai salah satu kawasan yang cenderung menjadi wilayah rawan terjadi aksi terorisme dibandingkan dengan beberapa Negara yang berada di kawasan Asia Tengah (Afghanistan) dan Timur Tengah. Disamping tempat berkembangnya salah satu jaringan terorisme global yaitu Jamaah Islamiyah (JI), kawasan Asia Tenggara juga menjadi target ancaman dan sasaran terorisme yang didominasi oleh penyerangan-penyerangan radikal kepada instalasi vital asing, penyerangan sporadis terhadap komunitas religi lain yang dinilai memiliki sentimen tersendiri yang dapat berakibat fatal bagi masyarakat yang terdampak.<sup>7</sup>

Meningkatnya isu terorisme yang terjadi di Asia Tenggara telah mengakibatkan ASEAN dituntut untuk berperan lebih besar dalam penyelesaian masalah ini. Menurut *Global Terrorism Database* (GTD), dimulai dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2016 terdapat 11.453 kasus terorisme di kawasan Asia Tenggara.<sup>8</sup> Oleh karena itu, isu yang berkaitan tentang terorisme ini menjadi sebuah kejahatan transnasional yang perlu untuk diambil tindakan yang signifikan. Namun sebelum menyinggung lebih dalam persoalan kerjasama yang hendak dilakukan nantinya, untuk itu terlebih dahulu penulis akan memaparkan terkait tentang sejarah dan

---

<sup>7</sup> charya, Amitav, & Acharya, Arabinda. (2007). The Myth of the Second Front: Localizing the 'War on Terror' in Southeast Asia. *Washington Quarterly*, Vol. 1, No. 4, p. 75-90.

<sup>8</sup> Dillon, D. R., & Pasicolan, P. (2002). Promoting a Collective Response to Terrorism in Southeast Asia. *Heritage Foundation*, Vol. 1, p. 9-11.

perkembangan terorisme di Asia Tenggara dan juga khususnya di Indonesia dengan kemudian dilanjutkan membahas mengenai kerjasama yang hendak dilakukan.<sup>9</sup>

### **Sejarah dan Perkembangan Terorisme di Asia Tenggara**

Isu persoalan terorisme sudah berkembang sejak berabad-abad yang lalu. Hal ini ditandai dengan bentuk kejahatan yg murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dari bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran tentunya dengan tujuan tertentu sebagai wujud penolakan terhadap ketidakseimbangan yang dihasilkan dari sistem sebuah pemerintahan maupun kebijakan yang dilahirkan.<sup>10</sup>

Pada sejarah terorisme modern persoalan keamanan ini muncul pada akhir abad 19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia-1 dan terjadi hampir di seluruh permukaan bumi. Dalam sejarahnya dicatat bahwa aksi terorisme sudah terjadi pada tahun 1890-an yaitu di Armenia melawan pemerintah Turki, yang berakhir dengan pembantaian dan pembunuhan massal terhadap warga Armenia pada PD-1. Oleh karena itu pada dekade PD-1, aksi terorisme diidentikkan sebagai sebuah bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan ideologi. Konfrontasi Negara adikuasa yang meluas menjadi konflik Timur-Barat dan menyeret beberapa Negara Dunia Ketiga ke dalamnya yang menyebabkan timbulnya konflik Utara-Selatan. Perjuangan melawan penjajah, pergolakan rasial, konflik regional yang menarik campur tangan pihak

---

<sup>9</sup> Jones, W. S. (1993). Logika hubungan internasional: Kekuasaan, ekonomi- politik internasional, dan tatanan dunia 2. PT Gramedia Pustaka Utama, Vol. 2, p. 2-5.

<sup>10</sup> Pushpanathan, S. (2003, August). ASEAN Efforts To Combat Terrorism. In Second APEC Counter-Terrorism Task Force Meeting (Vol. 20), p. 20-24.

ketiga, pergolakan dalam negeri di sekian banyak negara Dunia Ketiga, yang tentu membuat dunia bergejolak.<sup>11</sup>

Dengan berbagai pergolakan tersebut tentu dapat menghasilkan ketidakstabilan dunia ditambah dengan rasa frustrasi dari banyak Negara Berkembang dalam perjuangan menuntut hak-hak yang dianggap fundamental yang berakhir dengan terbuka lebarnya peluang muncul dan meluasnya terorisme. Terorisme telah berkembang dalam sengketa ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya, bahkan juga oleh aksi pemerintah sebagai cara dan sarana mereka menegakkan kekuasaannya.<sup>12</sup>

Dinamika politik internasional pasca perang dunia II menjadikan isu terorisme menjadi kabur atau teralihkan. Hal itu juga berlaku di wilayah Asia Tenggara yang dalam perkembangan kepemimpinannya begitu populer di dalam benak masyarakatnya, meskipun pada kenyataannya kepemimpinan Negara-negara Asia Tenggara cenderung otoritarian maupun totalitarian, seperti pada kepemimpinan Soekarno dan Soeharto di Indonesia, kepemimpinan Thaksin Sinawatra di Thailand, kepemimpinan Mahathir Mohammad di Malaysia dan beberapa rezim kepemimpinan lainnya yang terlalu focus terhadap persoalan keamanan, sehingga perkembangan mengenai isu terorisme luput dari pandangan mereka.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START). (2017). Global Terrorism Database. Diakses pada 24 Februari 2017.

<sup>12</sup> Yuniarti, A. (2012). Strategi ASEAN Membangun Sense of community. *Jurnal Paradigma*, Vol. 2, p. 33-45

<sup>13</sup> Dillon, D. R., & Pasicolan, P. (2002). Promoting a Collective Response to Terrorism in Southeast Asia. *Heritage Foundation*, Vol.2, p. 4-6.

Di wilayah Asia Tenggara sendiri terorisme memiliki karakteristik yang khas yang membedakannya dengan wilayah lain.<sup>14</sup> Pada dekade 1980-an, terorisme di wilayah Asia Tenggara berkaitan dengan pergerakan (*rebellion*) sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim dan kemudian hingga tahun 2013 isu ini semakin melemah, namun masih tetap ada sebagai contoh adalah *New People Army* (NPA) di Filipina. Gerakan terorisme di wilayah Asia Tenggara memiliki semangat konsistensi yang tinggi. Meskipun pada umumnya gerakan teroris muncul dan mulai berkembang di tahun 1970/1980-an, namun hingga saat ini gerakan teroris ini masih menunjukkan eksistensinya dalam memperjuangkan kepentingannya di beberapa Negara Asia Tenggara, diantaranya MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) di Filipina, gerakan Patani di Thailand, Jamaah Islamiyah di Malaysia dan beberapa organisasi teroris yang lainnya.<sup>15</sup>

Pada rentang tahun 2006 hingga 2013, perkembangan terorisme di kawasan Asia Tenggara menunjukkan peningkatan dari skala aksi maupun pola aksi yang semakin bervariasi dengan didominasi pada aksi peledakan bom yang semula secara konvensional berkembang menjadi peledakan bom yang bersifat *high explosive* yang banyak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan material.<sup>16</sup> Adapun beberapa Negara Asia Tenggara yang menjadi target sasaran terorisme dalam rentang tahun 2005 hingga tahun 2013 yaitu diantaranya, Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand, meskipun begitu dalam aksi terorisme skala kecil juga memberikan dampak

---

<sup>14</sup> Soesilowati, S. (2011). Asean's response to the challenge of terrorism. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik (Society, Culture and Politics)*, Vol. 24, p. 228-241.

<sup>15</sup> Banlaoi, R. (2009). *Philippine Security in the Age of Terror: National, regional, and global challenges in the post-9/11 world*, diakses pada 12 Juli 2023.

<sup>16</sup> Ramakrishna, K., & Tan, S. S. (Eds.). (2003). *After Bali: the threat of terrorism in Southeast Asia. World Scientific*, diakses pada 12 Juli 2023.

yang cukup mengganggu beberapa Negara Asia Tenggara lain seperti halnya di Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Vietnam dan Kamboja.<sup>17</sup>

Berlanjut dalam beberapa tahun setelahnya yaitu pada tahun 2016, Konstelasi terorisme dunia mengalami pergeseran ketika ISIS terbentuk. Organisasi-organisasi teroris yang pada awalnya berkiblat pada Al-Qaeda, yang kemudian berganti ke ISIS. Sejak awal didirikan, propaganda ISIS diarahkan pada Muslim Asia Tenggara dengan merekrut orang Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk bergabung dalam upaya perang di Irak dan Suriah, atau untuk melakukan jihad bersenjata di wilayah mereka sendiri. Pendekatan ISIS ke Asia Tenggara adalah bagian dari agenda regional dan transnasionalnya. Pejuang Filipina, Indonesia, dan Melayu yang berkumpul kembali melalui Katibah Nusantara yaitu sebuah batalyon regional berbahasa Melayu di *front* Suriah-Irak.<sup>18</sup>

Propaganda ISIS yang ditujukan kepada simpatisan lokal member seruan kepada jihadis Asia Tenggara dari semua Negara untuk berkumpul di Mindanao, Filipina Selatan untuk berlatih dan bertarung. Upaya ISIS untuk merebut wilayah di Asia Tenggara berfokus di Kota Marawi, Mindanao, Filipina. Selain itu, ISIS juga sebelumnya telah berusaha untuk membangun fondasi di Poso,<sup>19</sup> Indonesia dan Malaysia. Uraian diatas memberikan isyarat bahwa Negara-negara ASEAN dituntut untuk meningkatkan kapabilitas kontra-terorisme demi mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme, baik dalam skala nasional maupun regional.

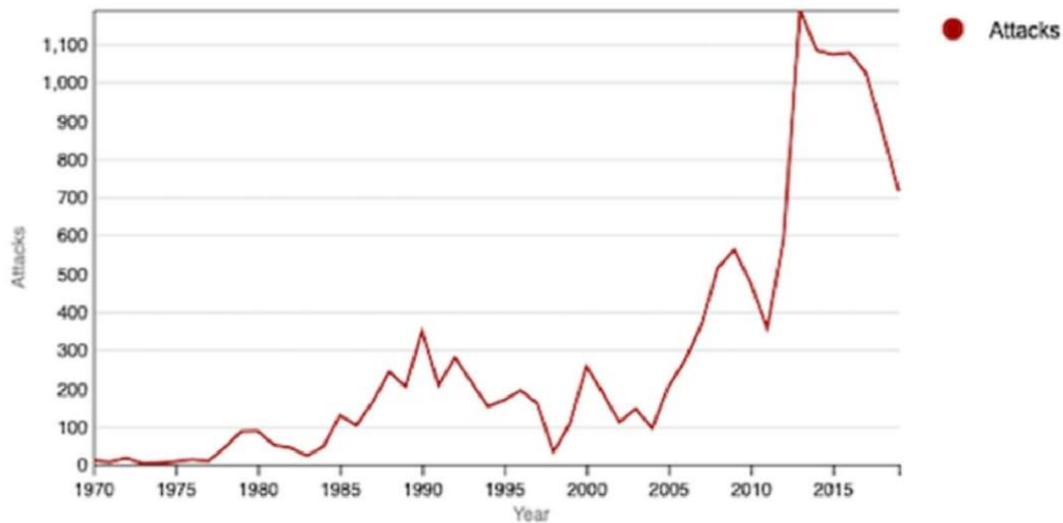
---

<sup>17</sup> Tan, S. S., & Nasu, H. (2016). *Asean and the development of counter-terrorism law and policy in Southeast Asia*, Vol. 1, p. 11-18.

<sup>18</sup> Wibisono, A. N. (2016). Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina Selatan: Analisis Organisasi Terorisme Asia Tenggara. *Ilmu Ushuluddin*, Vol. 3, No. (1), p. 119-132.

<sup>19</sup> Collins, Allan. 2000, *The Security Dilemmas Of Southeast Asia*, London: Macmillan Press Ltd.





**Grafik 1.** Insiden Terorisme di Asia Tenggara  
(Sumber: Global Terrorism Database, 2021)

Grafik diatas menunjukkan ancaman terorisme di Asia Tenggara yang mengalami peningkatan sejak tahun 2015/2016.<sup>20</sup> Eksistensi ISIS membawa dampak yang besar terhadap eskalasi serangan teroris di negara-negara ASEAN.<sup>21</sup> Berdasarkan data dari Global Terrorism Database, insiden terorisme di Asia Tenggara mencapai 3.689 kasus sepanjang tahun 2016 hingga 2019. Mayoritas angka tersebut terjadi di Filipina, salah satunya adalah insiden serangan *New People's Army* (NPA) di Kota Pinanag-an pada tanggal 11 November 2019 yang mengakibatkan 7 korban jiwa dan 20 korban luka-luka. Selain itu terdapat banyak kasus terorisme di Filipina yang dilakukan oleh kelompok-kelompok lain.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Masyarakat Politik Keamanan ASEAN dipetik bulan September 2017 pada <[www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Politik-Keamanan-ASEAN.aspx](http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Politik-Keamanan-ASEAN.aspx)>, diakses pada 12 Juli 2023.

<sup>21</sup> Institute for Economics and Peace. 2016. Global Terrorism Index 2016, Institut for Economics and Peace, Vol.2, p. 20-24.

<sup>22</sup> Said Khairizky. 2015. "Peran Asean Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme Di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2011-2014". Jom Fisip Vol 2 No 2, p. 5-8.

Penyerangan yang dilakukan oleh Abu Sayyaf di Kota Igasan pada 25 Mei 2019 yang mengakibatkan 15 korban jiwa dan 14 luka-luka. Abu Sayyaf juga dinilai kerap melakukan ancaman di Malaysia. Pada 5 Desember 2018, Abu Sayyaf meneror Kota Semporna, Malaysia dan mengakibatkan 1 korban jiwa sedangkan 2 lainnya luka-luka.<sup>23</sup> Disamping penyerangan di kota tersebut, Abu Sayyaf juga menjadi ancaman bagi Indonesia karena seringkali menculik nelayan Indonesia yang berlayar di laut utara Sulawesi yang berbatasan langsung dengan Filipina Selatan.<sup>24</sup> Berlanjut di sebelah utara wilayah negara Indonesia yaitu Thailand, juga mengalami ancaman terorisme yang didominasi oleh Barisan Revolusi Nasional (BRN), sebuah gerakan separatis Patani yang beraktivitas di Thailand Selatan. Selanjutnya pada 5 November 2019, BRN melakukan serangan kepada polisi dan masyarakat sipil di Kota Lam Phaya yang mengakibatkan 15 korban jiwa dan 5 luka-luka.<sup>25</sup>

Sedangkan Indonesia mengalami ancaman teror dari beberapa kelompok seperti Jemaah Islamiyah (JI), Jemaah Ansharud Daullah (JAD), Mujahidin Indonesia Timur (MIT), dan ancaman yang lainnya. Dibandingkan Filipina, Malaysia, dan Thailand, Negara Asia Tenggara lainnya seperti Laos, Kamboja, Brunei, Singapura, dan Vietnam mengalami eskalasi ancaman teror yang relatif sedikit.<sup>26</sup> Bergeser ke negara Asia Tenggara lainnya yaitu Kamboja yang tercatat pernah mengalami ancaman teror dari *Cambodian Freedom Fighters* (CFF).

---

<sup>23</sup> Atkinson, G. (2012). Abu Sayyaf: The Father of the Swordsman. American Security Project, Perspective, diakses pada 12 Juli 2023.

<sup>24</sup> Nainggolan, P. P. (2016). Pembajakan Kapal dan Penculikan WNI oleh Kelompok Abu Sayyaf. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. 1, p. 5-8.

<sup>25</sup> Amijoyo, H. A. (2019). kebijakan luar negeri Najib Razak terhadap konsolidasi Thailand dan gerakan aliansi separatisme etnis melayu di Thailand Selatan tahun 2013- 2016. jurnal hubungan internasional, Vol.2, p. 108-109.

<sup>26</sup> Hasan, Noorhaidi, Laskar Jihad, Islam , Militansi dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde baru , Jakarta: Pustaka LP3ES, Cet. I, 2008, diakses pada 12 Juli 2023.

Berlanjut tidak jauh dari negara Kamboja yaitu Laos pernah menjadi wilayah yang mengalami penyerangan oleh *Free Democratic People's Government of Laos* yaitu terjadi pada 31 Oktober 2003 di Kota Vientiane. Kumpulan uraian data di atas mengisyaratkan bahwasanya ancaman-ancaman maupun penyerangan yang sangat memprihatinkan tersebut perlu perhatian serius dari ASEAN dengan cara memanfaatkan beberapa forum-forum seperti AMMTC dan juga yang suda ada sebelumnya untuk tanggap di dalam penanggulangannya.

Setelah beberapa uraian mengenai karakteristik dari terorisme yang telah beberapa tahun terakhir terjadi di kawasan Asia Tenggara yang didasarkan pada faktor ideologi maupun yang bersifat religi semakin mencapai puncaknya yang mana sejak tahun 2016, Negara Islam memproklamirkan diri sebagai *Islamic State* (IS) atau *Daesh*, telah melancarkan serangan propaganda yang mereka arahkan kepada Muslim di Asia Tenggara ketika mereka merekrut orang Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk bergabung dengan cara berperang di Irak dan Suriah, atau untuk melakukan jihad bersenjata di wilayah mereka sendiri.<sup>27</sup>

Pendekatan IS di Asia Tenggara adalah bagian dari agenda transnasional regionalnya. Sama halnya dengan pejuang Filipina, Indonesia, dan Malaysia yang digabung kembali di Katibah Nusantara.<sup>28</sup> Batalion Regional Berbahasa. Melayu di *Front* Suriah-Irak, propaganda IS ditujukan kepada seruan simpatisan lokal agar para jihadis Asia Tenggara dari semua kebangsaan untuk berkumpul di Mindanao, berlokasi di Filipina Selatan, untuk berlatih dan bertarung. Disisi lain, ketika IS

---

<sup>27</sup> Indriyanto, Seno Adji, Bali, "Terorisme dan HAM" dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia, Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001, diakses pada 12 Juli 2023.

<sup>28</sup> Wahid, Abdul, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum, Retika Aditama, 2004, Vol. 2, p. 13-17.

kehilangan posisi di *front* Timur Tengah, IS secara aktif berusaha untuk membangun jaringan global, dan melakukan desentralisasi wilayah. Upaya IS untuk merebut wilayah di Asia Tenggara sulit untuk diatasi di Kota Marawi yang mana menjadi tempat teroris saat itu karena kelompok ini sebelumnya telah berusaha untuk mendirikan pijakan di Poso, Indonesia dan Malaysia.<sup>29</sup>

Melihat berkembangnya ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara, tentu dibutuhkan kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara untuk menyelesaikannya. Sebuah kerjasama anti terorisme yang ter-regionalisasi sangat dibutuhkan, dan ASEAN menjadi sebuah wadah yang tepat bagi negara-negara Asia Tenggara untuk menerapkan kerjasama tersebut. Hal ini juga tercantum pada deklarasi pada saat ASEAN baru didirikan, yaitu Deklarasi Bangkok. Dalam deklarasi tersebut salah satu misi ASEAN adalah untuk menjaga keamanan dan kestabilan kawasan Asia Tenggara.<sup>30</sup> Hal itu pun ditambah dengan dibentuknya *ASEAN Security and Political Community* (APSC), dilanjutkan dengan pembentukan kerjasama yang lebih serius dalam penanggulangan terorisme skala internasional yaitu *Asean Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) dan juga diikuti dengan keikutsertaan beberapa negara yang menjadi penguasaan Asia Timur yaitu Jepang, Cina, dan Korea Selatan untuk turut serta dalam AMMTC +3 yang diyakini dapat memberikan dampak positif dalam penerapannya guna menanggulangi terorisme.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Calballero, Mely-Anthony, 2008. Mechanism of Dispute Settlement: The ASEAN Experience. (Contemporary Southeast Asia, Vo. 20, No.1, p. 9-11).

<sup>30</sup> ASEAN. 2016. ASEAN Political Security Community (APSC). Di akses di laman <<https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/11b.-April-2016-Fact-Sheet-of-APSC.pdf>> pada 12 Juli 2023.

<sup>31</sup> Ramakrishna, Kumar. 2004. Terrorism In Southeast Asia: The Ideological and Political Dimensions. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS). Vol, 2, p. 50-55.

### **ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) +3**

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) merupakan sebuah organisasi regional/kawasan di Asia Tenggara yang saat ini memiliki anggota 10 negara; yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan 6 negara lainnya. Tujuan awal didirikannya ASEAN ini adalah sebagai wadah untuk berdialog diantara negara-negara di kawasan yang tujuannya untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan, dan tidak melupakan untuk meningkatkan mutu perdamaian regional melalui prinsip keadilan dan peraturan hukum yang merujuk pada prinsip *UN Charter*. Seiring dengan semakin matangnya ASEAN sebagai sebuah organisasi regional/kawasan, kerja sama yang dilakukan ASEAN juga berkembang. Oleh karena hal tersebut, lahirlah tiga masyarakat besar dalam wadah ASEAN. Tiga pilar masyarakat tersebut adalah :

1. Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN atau *ASEAN Political Security Community* (APSC),
2. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau *ASEAN Economic Community* (AEC),
3. Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN atau *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC).<sup>32</sup>

Ketiga pilar masyarakat ASEAN tersebut masing-masing menangani isu-isu strategis di kawasan yang menjadi perhatian utama negara-negara di Asia Tenggara. Salah satu isu strategis yang selalu menjadi perhatian utama negara-negara anggota ASEAN yaitu isu terorisme.<sup>33</sup> *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) merupakan bagian dari salah satu pilar Masyarakat ASEAN yaitu

---

<sup>32</sup> Yanyan M. Yani, 2018. "Keharmonisan Kerjasama Kontra Terorisme Negara-negara Anggota ASEAN Dalam Kerangka *ASEAN Security Community*", Jakarta, 2018, Vol. 1, p. 1-2.

<sup>33</sup> Ibid, p. 2-3.

Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN. Kerja sama dalam lingkup AMMTC ini kemudian menjadi penting untuk ditindaklanjuti karena selain dampak negatif yang ditimbulkan terhadap pertahanan dan keamanan negara, penanganan isu terorisme juga menjadi signifikan untuk dilakukan bersama melalui forum AMMTC karena seluruh negara anggota ASEAN beberapa tahun sebelumnya sudah meratifikasi ACCT pada tahun 2011.

*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* merupakan pertemuan setingkat menteri yang khusus membahas mengenai isu-isu kejahatan lintas negara di ASEAN. AMMTC pertama kali dilaksanakan pada tahun 1997 dan selanjutnya diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali. Namun sejak tahun 2017 Pertemuan/forum AMMTC diselenggarakan setiap tahun sekali. Perlu diketahui juga bahwa ASEAN juga aktif menjalin kerjasama dengan Mitra Wicara ASEAN dalam upaya pemberantasan kejahatan lintas negara. Kerja sama tersebut tertuang dalam berbagai deklarasi bersama (*joint declarations*), *memorandum of understanding (MoU)*, *plan of action (PoA)*, dan *work plan* yang mencakup berbagai inisiatif dan proyek kerja sama.<sup>34</sup>

### **Agenda dan Deklarasi Pertemuan AMMTC *Plus Three***

Pada pertemuan tingkat AMMTC, ASEAN memiliki mekanisme dialog AMMTC + *Dialogue Partner Consultation Plus Three* (RRT, Jepang, Republik Korea (ROK)). Dalam 5 kali pertemuan terakhir forum AMMTC +3 yang diselenggarakan di beberapa negara berbeda dengan tujuan mempererat hubungan antar negara anggota dan juga untuk membahas lebih lanjut mengenai

---

<sup>34</sup> Muhammad Fahrian Yovantra, M. Afifuddin, Herlina J.R. Saragih, 2018. "Indonesia dan Kerjasama ASEAN Untuk Mengatasi Terorisme Melalui AMMTC", Jakarta, Manajemen Pertahanan, Vol. 4, No. 1, p. 10-12.

penanggulangan kejahatan transnasional khususnya kejahatan terorisme yang semakin membuat masyarakat terbelenggu dalam ketakutan oleh karena itu, pertemuan tingkat AMMTC yang pada awalnya diselenggarakan 2 tahun sekali menjadi setahun sekali sebagai bentuk isyarat semakin seriusnya negara-negara anggota untuk penanggulangan terorisme.<sup>35</sup>

Pada pertemuan AMMTC *plus three* yang diadakan di Manila, Filipina pada 21 September tahun 2017, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang dan Republik Korea menjadi penanggung jawab untuk menangani kejahatan transnasional seperti kejahatan terorisme. Pertemuan tersebut menjadi pertemuan yang ke-8 (delapan) kalinya diselenggarakannya AMMTC dengan dipimpin oleh Pemimpin AMMTC Catalino S. Cuy, sebagai penanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dari Republik Filipina. Pertemuan yang diadakan tersebut dihelat dengan tujuan menjalin komitmen berlanjut untuk lebih mempererat kerjasama dalam pencegahan dan memerangi kejahatan transnasional khususnya kejahatan terorisme.<sup>36</sup>

Dalam pertemuan AMMTC *plus three* selanjutnya yang diselenggarakan di Myanmar pada 01 November 2018 yang dipimpin oleh Pemimpin AMMTC Myanmar, Letnan Jenderal Kyaw Swe, yang juga sebagai Menteri Persatuan Kementerian Dalam Negeri Republik Persatuan Myanmar. Dalam pertemuan tersebut membahas hasil peningkatan atau kemajuan dalam implementasi rencana penanggulangan kejahatan transnasional dan selanjutnya diharapkan dapat untuk

---

<sup>35</sup> S. Martel, "From Ambiguity to Contestation: Discourse(s) of Non-Traditional Security inity". *The Pacific Review* 30, No. 4. (2017): p. 549-565.

<sup>36</sup> Sekretariat Nasional ASEAN, 2017. "Deklarasi Pertemuan AMMTC *Plus Three* di Manila, Filipina", Jakarta, Diakses di <<https://setnasasean.id/asean-ministerial-meeting-on-transnational-crime-ammtc>> pada 10 Juli 2023.

lebih mengintensifkan kerjasama melalui pertukaran informasi dan praktik terbaik serta meningkatkan kapasitas secara tepat waktu dan efektif.

Pada pertemuan AMMTC +3 selanjutnya digelar di Bangkok, Thailand pada tanggal 28 November 2019 yang dipimpin oleh Pemimpin AMMTC Thailand, Jenderal Chaichan Changmongkol, Wakil Menteri Pertahanan Kerajaan Thailand. Pertemuan tersebut tentunya berdasarkan pada komitmen untuk lebih memperkuat keinginan dari masing-masing negara anggota untuk mencapai yang disebut sebagai keamanan regional. Sehingga sangat perlu bentuk ketegasan dari negara-negara yang tergolong dalam keikutsertaan menanggulangi kejahatan transnasional sebagaimana diartikulasikan dalam Rencana Kerja Kerjasama ASEAN Plus Tiga (2018-2022), seperti perdagangan manusia, kejahatan dunia maya (*cyber security*), terorisme, dan ekstremisme *kekerasan* dan perdagangan obat-obatan terlarang yang terus mengancam kestabilan keamanan kawasan.

Berlanjut dua tahun setelahnya, karena pada tahun sebelumnya ada kendala dalam menggelar pertemuan disertai beberapa agenda dalam menanggulangi kejahatan transnasional terganggu pelaksanaannya karena semakin maraknya wabah virus corona. Oleh karena itu, pertemuan tingkat menteri AMMTC +3 dilanjutkan kembali namun pertemuannya dilakukan melalui *video conference* pada 30 September 2021 yang dipimpin oleh Brunei Darussalam. Dengan melakukan penguatan kerjasama, komitmen yang kuat tentunya harus dilakukan secara terus-



menerus untuk penguatan lebih lanjut dalam memastikan perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara.<sup>37</sup>

Pertemuan AMMTC +3 berikutnya digelar di Cambodia, dengan dipimpin oleh Kerajaan Kamboja dengan tema “ASEAN A.C.T. *Addressing Challenges Together*” dengan memberikan kemajuan hasil kerjasama yang cukup baik di tahun sebelumnya tentu dibawah kerangka kerjasama AMMTC +3. Pada pertemuan terakhir tersebut sebelum akan diadakan pada tahun 2023, pertemuan tersebut diwarnai dengan pertukaran pendapat tentang situasi keamanan saat ini, menilai kerjasama yang ada dan memberikan penegasan kembali komitmen mereka untuk memajukan ASEAN *Plus Three* (APT) kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transional khususnya aksi kejahatan terorisme yang dari tahun-ke-tahun sudah mulai menunjukkan wajah baru yang semakin membelenggu kestabilan keamanan kawasan.<sup>38</sup>

Dengan diselesaikannya lima pertemuan dalam 5 tahun terakhir bahwa diantara masing-masing negara anggota pertemuan tingkat menteri AMMTC +3 menunjukkan keseriusan dalam keinginan kuat mereka untuk menumpas habis kejahatan transnasional, khususnya kejahatan dalam bentuk yang paling mengkhawatirkan yaitu terorisme. Penulis menemukan bacaan yang cukup menarik ketika melakukan pencarian data-data tambahan terkait persoalan terorisme. Bacaan tersebut bertemakan manajemen krisis.

---

<sup>37</sup> Sekretariat Nasional ASEAN, 2021. “Pertemuan Forum Kerjasama AMMTC *Plus Three* via *Video Conferences*”, Jakarta, Diakses di laman <<https://setnasasean.id/asean-ministerial-meeting-on-transnational-crime-ammtc>> pada 10 Juli 2023.

<sup>38</sup> Luhulima, C.P.F. Pemberantasan Terorisme dan Kejahatan Transnasional dalam Pembangunan Keamanan Asia Tenggara. Analisis CSIS, 2002, Vol. 2, p 14-17.

Menurut Peter F. Drucker mengemukakan bahwa dalam kurun waktu yang penuh gejolak (turbulen) seperti halnya dewasa ini, Peter mengatakan bahwa “hari esok bukanlah dengan sendirinya adalah kelanjutan hari ini”.<sup>39</sup> Sekilas pada kalimat tersebut tidak cukup baik dalam penulisan kata, namun yang penulis pahami dari hal itu adalah bahwa hari esok tidak berbeda dengan hari ini, namun hari esok adalah kelanjutan dari hari ini. Kalimat tersebut memberikan kandungan arti tersendiri bagi penulis yang berguna didalam mendukung data pada uraian sebelumnya.

Peter menambahkan dengan mengatakan tidak seorang pun dapat mengelak dan melepaskan diri dari terjangan arus perubahan. Perubahan yang dibiarkan tidak dikelola, apabila dilawan tentu akan berkembang biak menjadi konflik. Penyelesaian konflik yang memuaskan akan membawa para pihak dalam kondisi *cooperative aftermath* (akhir yang mengakibatkan lahirnya kerjasama), sedangkan penyelesaian yang tidak memuaskan, yang biasanya karena ingin cepat, pada akhirnya akan menimbulkan permusuhan (*combative aftermath*), penyelesaian combative ini akan menghadirkan konflik baru, yang tidak menutup kemungkinan akan berkembang menjadi Krisis.

Hal itulah yang menjadi alasan dibalik berkembangnya aksi kejahatan terorisme di kawasan Asia Tenggara khususnya di Indonesia yaitu sudah sampai pada permasalahan krisis yang artinya sudah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan. Setiap krisis adalah simbol darurat, namun tidak semuanya adalah suatu krisis. Krisis tentu perlu ditangani oleh manajemen terhadap krisis. Krisis

---

<sup>39</sup> Hery Firmansyah, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah mada, Juni 2011, Vol. 23, p. 2-3.

adalah kondisi tidak stabil yang bergerak ke arah suatu titik balik, dan melahirkan potensi perubahan yang sangat berpengaruh.

### **Upaya Indonesia Untuk Mengatasi Terorisme di Indonesia Melalui Kerangka Kerjasama AMMTC *Plus Three***

Aksi teror yang terjadi di wilayah Indonesia yang dimulai dengan aksi terorisme Bom Bali beberapa tahun silam tentu memberikan pelajaran yang berarti bagi aparat penegak beserta masyarakat yang turut merasakan dampaknya maupun yang hanya mendengarnya dari berita di televisi maupun di media lainnya. Hanya dengan mendengar atau melihat kabarnya saja dapat memberikan pengaruh yang cukup mengkhawatirkan bagi masyarakat seluruh wilayah NKRI, karena dengan keberadaan terorisme membelenggu masyarakat dalam penjara kekhawatiran.<sup>40</sup>

Bagi Indonesia, pencegahan dan pemberantasan terorisme memerlukan kecermatan pengamatan atas kultur, kondisi masyarakat, dan stabilitas politik pemerintahan. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi efektivitas undang-undang tersebut. Konsep barat dan negara Islam tentang definisi terorisme sangat sulit diterima oleh Indonesia karena kondisi politik yang terjadi di negara-negara yang berbasis Islam berbeda secara mendasar baik dari sisi latar belakang dan perkembangannya dengan yang terjadi di Indonesia. Begitu pula kultur masyarakat baik dari negara-negara tersebut maupun dari negara barat berbeda dengan kultur masyarakat Indonesia.

---

<sup>40</sup> Ashgar, Ali. 2015, "Islam, Politik dan Radikalisme" : Tafsir Baru Kekerasan Aktivisme Islam di Indonesia, Jurnal Keamanan Nasional, Volume 1, Nomor 2, p. 5.

Indonesia secara serius sudah melakukan upaya-upaya penanggulangan terorisme, upaya ini dapat digolongkan ke dalam dua cakupan yaitu internal dan eksternal. Upaya internal adalah upaya-upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tanpa melibatkan negara lain, sedangkan upaya eksternal adalah upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan dengan negara lain baik dalam lingkup regional maupun lingkup internasional.

Langkah-langkah lain yang dapat disebut sebagai sebuah upaya dan strategi operasionalisasi kontra terorisme di ASEAN yang disepakati oleh negara-negara anggota sebagai lanjutan dari *ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism*:

a. Kerjasama Intelijen melalui *ASEAN Chiefs of Police (ASEANOPOL)*

Strategi dan operasi ASEANOPOL khususnya di bidang terorisme mencakup beberapa hal, yakni; pertukaran informasi dan organisasi terkait terorisme, berbagi informasi dan fasilitas akses diantara negara anggota dalam menginterogasi tersangka teroris, menyediakan bantuan kepada negara anggota termasuk pelacakan, pembekuan, dan penyitaan aset yang terkait dengan teroris atau organisasi yang terkait teroris dan mempromosikan kerjasama yang erat antara entitas penegak hokum dan institusi keuangan. Serta menjalin Kerjasama dengan entitas yang terkait semisal Interpol serta pembentukan pasukan anti terorisme di masing-masing negara anggota ASEAN.<sup>41</sup>

Namun demikian, ASEANOPOL ini ternyata bukan bagian dari struktur organisasi ASEAN. Penggunaan nama ASEAN di sini adalah untuk menunjukkan

---

<sup>41</sup> Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 2008. *Human Rights, Terrorism and Counter-terrorism*. Geneva: United Nations, Vol. 1, p. 2

cakupan kawasan yang menjadi ruang lingkup pekerjaan ASEANOPOL. ASEANOPOL ini hirau dengan keamanan regional di kawasan Asia Tenggara yang juga merupakan *joint partnership* dengan Pemerintah AS. Tidak hanya dalam urusan terorisme namun juga dalam urusan *trans national organized crime* (yang sebelumnya merupakan bagian dari kejahatan terorisme). Selain itu, operasionalisasi kontra terorisme oleh ASEANOPOL ini juga meliputi pembekuan aset dan perjanjian ekstradisi teroris.<sup>42</sup>

b. Pelatihan bersama kontra terorisme di ASEAN

Pernah dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari *The ARF Inter-Sessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime* (ISM CT – TC) yang disetujui di Sabah pada tahun 2003. Melalui consensus ini, AS menyediakan dukungan teknis bagi beberapa negara ASEAN untuk melakukan pelatihan bersama seperti pasca ledakan, investigasi forensic, pelatihan pasukan respot cepat, keamanan perbatasan, pengembangan *software*, dan *cyber-terrorism*. Selain itu, pelatihan pengamanan penerbangan dan lokakarya kesiapan menghadapi senjata kimia, biologi dan nuklir oleh kelompok teroris pun dilakukan antara AS dengan Singapura serta Australia.<sup>43</sup>

Oleh karena itu, apa yang saat ini terjadi di Asia Tenggara sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang dapat dikatakan bahwa terdapat keselarasan diantara kejadian di Asia Tenggara dengan kepentingan AS dalam konteks *Global War on Terror*. ASEAN menyediakan landasan kebijakannya tetapi dalam konteks

---

<sup>42</sup> Ibid. p. 2.

<sup>43</sup> Heri Firmansyah, 2018. “Upaya Penanggulangan Tindak Terorisme Di Indonesia”, Jakarta, diakses pada 12 Juli 2023.

operasional dan strategi kontra-terorisme, semuanya diserahkan kepada masing-masing negara anggota ASEAN itu sendiri bahwa dengan atau tanpa bantuan AS.<sup>44</sup>

Konsistensi ASEAN untuk tidak melakukan kontra terorisme di tataran operasional-strategi didasari atas landasan tujuan ASEAN Charter itu sendiri yaitu focus pada *confidence building measure*, pendekatan damai terhadap segala macam ancaman dan sengketa tanpa perlu mendeklarasikan diri sebagai pakta pertahanan seperti NATO apalagi membentuk pasukan khusus ASEAN. Apabila hal itu dilakukan tentu akan mengubah konstelasi perimbangan kekuatan di kawasan Asia, apalagi ancaman yang muncul adalah ancaman terorisme yang bersifat abstrak. Dengan demikian, keamanan regional di Asia Tenggara tampaknya sedikit banyak masih mengalami ketergantungan pada pihak AS khususnya dalam upaya kontra terorisme.

## **Kesimpulan**

ASEAN sebagai institusi regional Asia Tenggara, menjadi kawasan yang cukup strategis secara geopolitik dan geoekonomi, beranggotakan negara-negara yang memiliki persamaan kebudayaan, sejarah, dan politik. ASEAN membentuk sebuah komunitas politik keamanan yang merupakan salah satu pilar dalam komunitas ASEAN yang dilandasi oleh keinginan untuk mengintegrasikan kawasan Asia Tenggara yang stabil, damai, makmur, dan harmonis. Untuk mencapai hal tersebut, tentu diperlukan adanya kerjasama kawasan yang dalam penelitian ini terdapat sebuah forum kerjasama yang dapat disebut dengan istilah dipanjangkan yang bertuliskan *Asean Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) plus three*.

---

<sup>44</sup> Tan, S. & Nasu, H (2016). *ASEAN and the development of counter-terrorism law and policy in Southeast Asia*. Vol. 1, p. 5-6.

Kerjasama AMMTC *plus three* sudah berjalan cukup lama yaitu pada awal abad ke-21 ini. Namun yang menjadi hal yang sangat disayangkan adalah penerapan secara maksimal dari kerjasama ini baru dapat dirasakan dalam 5 tahun terakhir sejak pergelarannya mulai dilakukan setahun sekali. Tantangan demi tantangan didapat selama beberapa tahun terakhir sejak kerjasama ini terjalin, memberikan pelajaran yang berarti bagi negara-negara yang berpegang teguh pada keinginan untuk menstabilisasi kawasan. Sebagai sebuah kawasan yang mempunyai nilai penting dalam percaturan politik global, perkembangan isu terorisme di Asia Tenggara menjadi hal yang penting untuk ditelaah lebih dalam. Keanekaragaman budaya, bahasa, ideology, hingga kepentingan manusia didalamnya tentu menjadi daya tarik bagi kejahatan untuk muncul tidak terkecuali kemungkinan bersarangnya kejahatan dari terorisme.

Upaya-upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh Indonesia menunjukkan bahwa peran Indonesia cukup besar, hal ini diperkuat dengan hasil – hasil penangkapan pelaku teroris dan pengungkapan kasus terorisme di Indonesia. Namun demikian masih ada beberapa kendala yang dihadapi Indonesia dalam upaya menanggulangi terorisme baik dalam skala internal maupun skala eksternal. Demikian beberapa uraian diatas yang pada penjelasannya mengandung kata-kata penutup sekaligus menjadi salam terakhir yang ditujukan oleh penulis untuk siapapun nanti yang membacanya.

## **Daftar Pustaka**

### **BUKU**

- Kartasasmita, Koesnadi. (2004). *Administrasi Internasional*, Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Low, L. *ASEAN Economic Co-operation And Challenges*, Singapore: Institute of South East Asian Studies (ISEAS).
- Suparman, Nuraeni Sari, Deasy Silvy, dan Sudirman, Arfin. (2010). *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*.

Riyanto, Sugeng. (2009), Jakarta, LP3M UMY. "ASEAN Regional Forum: Upaya Menjaga Stabilitas Kawasan Asia Pasifik,"

Dillon, D. R., & Pasicolan, P. (2002). Promoting a Collective Response to Terrorism in Southeast Asia. Heritage Foundation.

## **JURNAL**

Giuliani Austha Namora, (2016), Peran ASEAN Convention On Counter Terrorism dalam Penanganan Terorisme di Filipina Periode 2011-2013, "*Journal of International Relations*, Volume 2, Nomor 4, hal :170-171, diakses tanggal 02 Maret 2023

Muhammad Fahrian Yovantra, (2018), Indonesia dan Kerja Sama ASEAN untuk Terorisme melalui AMMTC, Manajemen Pertahanan Vol.4 No.1, hal, -,-

Diana Dewi Setiawati, "Peran ASEAN dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme di Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan Convention On Counter Terrorism", JOM Fakultas Hukum, Volume II No.1, Februari, 2015:.2.

Reni Windiani, "Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme", Jurnal Ilmu Sosial Universitas Diponegoro, Vol. 16 No.2, Juli-Desember 2017, Hal. 135-152.

Arfin Sudirman dan Deasy Silvy Sari, "Membangun Keamanan Regional di ASEAN Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme", dipublikasi dalam Jurnal wacana Politik, Vol. 2, No.1, Maret 2017, Hal. 22-32

Pupu saful rahmat, (2019), penelitian kualitatif, vol. 5, no. 9, diakses tanggal 20 juni 2022

Yuniarti, A. (2012). Strategi ASEAN Membangun Sense of community. Jurnal Paradigma, 16(2), 33-45

Ramakrishna, K., & Tan, S. S. (Eds.). (2003). *After Bali: the threat of terrorism in Southeast Asia. World Scientific*, diakses pada 12 Juli 2023



- Amijoyo, H. A. (2019). kebijakan luar negeri Najib Razak terhadap konsolidasi Thailand dan gerakan aliansi separatisme etnis melayu di Thailand Selatan tahun 2013- 2016. jurnal hubungan internasional, 108-109.
- Assegaf, Nurcahya Tandang, 2004. Terorisme Internasional, Indonesia Dan Dinamika Internasional, Jogjakarta, Penerbit Ombak.
- S. Martel, "From Ambiguity to Contestation: Discourse(s) of Non-Traditional Security inity". The Pacific Review 30, No. 4. (2017): 549-565
- Mubah, A Safril. 2012. Teroris versus Globalisasi, PT. Revka Petra Media, Surabaya.
- Nainggolan, P. Poltak (ed.), 2002. Terorisme dan Tata Dunia Baru, CV. Tiga Putra Utama, Jakarta.
- Sudirman, A. (2013). Sekuritisasi Terorisme di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Konstruktivisme Pasca 11 September 2001. Jurnal Analisis CSIS, 42(2), 256-273
- Haryono, Endi. 2010. "Kebijakan Anti-Terorisme Indonesia: Dilema Demokrasi dan Represi". Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 14. No. 2. November.
- Ashgar, Ali : "Islam, Politik dan Radikalisme" : Tafsir Baru Kekerasan Aktivism Islam di Indonesia, Jurnal Keamanan Nasional, Volume 1, Nomor 2, 2015.
- M. Ali Busthomi. 2012. Mekanisme Asean Regional Forum Dalam Menangani Isu Terorisme Regional. Jurnal Review Politik Volume 02, Nomor 01.
- Lubis, Fuad Hasan. 2009. ASEAN Community 2015 dan Keamanan Regional: Studi Kasus Upaya ASEAN dalam Menangani Terorisme di Asia Tenggara. Disertasi, FISIP, Universitas Sumaterta Utara.
- Nainggolan, P. P. (2016). Pembajakan Kapal dan Penculikan WNI oleh Kelompok Abu Sayyaf. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 8 (19), 5-8.
- Wibisono, A. N. (2016). Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina Selatan: Analisis Organisasi Terorisme Asia Tenggara. Ilmu Ushuluddin, 3(1), 119-132.

## INTERNET

KEMLU, “Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN”, diakses pada laman <https://kemlu.go.id/portal/id/read/121/halaman/list/lainnya/masyarakat/politik/keamanan/asean/Pembentukan/Masyarakat/Politik/Keamanan/ASEAN/kawasan/regional/dan/global>

Alviandini Nanda dan Emmy Latifah, Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Terorisme Di Laut, <https://jurnal.uns.ac.id> diakses tanggal 20 Januari 2023

Luh Ashari Sumardewi, Universitas Udayana, Upaya Indonesia Dalam Memberantas Terorisme Di Era SBY, diakses di <https://ojs.unud.ac.id> 22 Februari 2023

Asep Adisaputra, (2008), FISIP, Universitas Indonesia, Motif-motif Aksi Terorisme, diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id> diakses tanggal 28 Februari 2023

Kementerian Pertahanan, 2018. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/indonesia-kanada-kolaborasi-penanggulangan-terorisme> Diakses pada 10 Juli 2023

Sekretariat Nasional ASEAN, 2017. “Deklarasi Pertemuan AMMTC *Plus Three* di Manila, Filipina”, Jakarta, Diakses di <<https://setnasasean.id/asean-ministerial-meeting-on-transnational-crime-ammtc>> pada 10 Juli 2023.

ASEAN, 2019. “Pertemuan Kerjasama AMMTC *Plus Three* di Myanmar”, Jakarta, Diakses di <<https://asean.org/asean-ministerial-meeting-on-transnational-crime-ammtc/>> pada 10 Juli 2023.

Sekretariat Nasional ASEAN, 2021. “Pertemuan Forum Kerjasama AMMTC *Plus Three* via *Video Conferences*”, Jakarta, Diakses di laman <<https://setnasasean.id/asean-ministerial-meeting-on-transnational-crime-ammtc>> pada 10 Juli 2023.